



---

## **POLA KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KABUPATEN KULON PROGO DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2014-2018**

Sarmito<sup>1</sup>, Dyah Mutiarin<sup>2</sup>, Achmad Nurmandi<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

---

### **Info Artikel**

*Sejarah Artikel:*  
Diterima: 30 Juni 2020  
Disetujui: 10 September 2020  
Dipublikasikan: 10 September 2020

**Kata kunci:**  
Komunikasi  
Pemerintahan,  
Pendapatan Asli  
Daerah (PAD),  
Kabupaten Kulon  
Progo

---

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintahan kulon progo dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, berapa indikator pada penelitian ini dianalisis menggunakan *software* Nvivo 12 Plus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kulon Progo, Provisi Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan melibatkan Bupati, TAPD, BAPPEDA, BKAD dan DPRD. Hasil dari penelitian ini menunjukkan trend positif dalam peningkatan PAD kulon progo dari kurun waktu tahun 2014-2018. Adanya komunikasi yang baik dilakukan pemerintahan kulon progo dalam upaya peningkatan PAD, dengan melakukan komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal antar lembaga yang menjadi *leading sector* dalam upaya meningkatkan PAD, dan komunikasi eksternal dengan masyarakat untuk membentuk komitmen bersama guna mensukseskan upaya peningkatan PAD, serta dengan pihak swasta dengan melalukan *Memorandum of Understanding (MoU)*, hal ini dilakukan sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam upaya meningkatkan PAD.

---

## **COMMUNICATION PATTERNS OF KULON PROGO REGENCY GOVERNMENT IN INCREASING LOCAL REVENUE IN 2014-2018**

**Keywords:**  
*Government  
Communication,  
Local Own  
Revenue (PAD),  
Kulon Progo  
Regency*

---

### **Abstract**

*This study aims to determine how the communication patterns carried out by the government of Kulon Progo to increase local revenue (PAD). This research uses descriptive qualitative method, how many indicators in this study were analyzed using Nvivo 12 Plus software. Data collection is done through observation, interview, and documentation. This research was conducted in Kulon Progo Regency, Provision of the Special Region of Yogyakarta, involving the Regent, TAPD, BAPPEDA, BKAD, and DPRD. The results of this study show a positive trend in increasing PAD kulon progo from the period 2014-2018. Good communication is carried out by the Kulon Progo government to increase PAD, by conducting internal and external communication. Internal communication between institutions that are leading sectors in the effort to increase PAD, and external communication with the*

*community to form a joint commitment to the success of efforts to increase PAD, and with the private sector through a Memorandum of Understanding (MoU), this is done as a means and supporting infrastructure in efforts to increase PAD.*

---

© 2018 Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Mataram

<sup>✉</sup> Alamat korespondensi:

<sup>1</sup>[Sarmito28@gmail.com](mailto:Sarmito28@gmail.com)

<sup>2</sup>[mutiarin@yahoo.com](mailto:mutiarin@yahoo.com)

<sup>3</sup>[achmadnurmandi@yahoo.com](mailto:achmadnurmandi@yahoo.com)

## **PENDAHULUAN**

Otonomi daerah dan desentralisasi yang efektif berlaku sejak Januari tahun 2001, dimana hal tersebut merupakan langkah strategis bagi Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Era desentralisasi menjadi era baru dalam pembangunan ekonomi daerah, dimana salah satu wujud otonomi daerah adalah kewenangan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pembangunan ekonomi daerah (Hadi, 2011).

Berdasarkan Undang–Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana pasal 1 (2) Pemerintah Daerah merupakan penyelenggara urusan yang ada dipemerintahan dilakukan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembuatan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana tertuang dalam UUD RI Tahun 1945. Pada penelitian (Sianturi, 2015) menyebutkan bahwasanya pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengurus dan mengatur rumah tangga secara mandiri dan menyeluruh berdasarkan peraturan yang ada, serta meningkatkan dan mengembangkan pendapatan asli daerah (PAD).

Hal inilah kemudian yang mendorong pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang ada di setiap daerahnya. Pemerintah daerah dituntut untuk mengoptimalkan pendapatan yang bersumber dari potensi daerah untuk meningkatkan PAD bagi daerahnya masing-masing (Handayani, 2018). Berdasarkan Pasal 1 (6) Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan anatar pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di sebutkan penerimaan daerah bersumber dari : a) Pendapatan Asli Daerah, b) Dana Perimbangan, dan c) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Sebagaimana daerah lain di Indonesia seperti Kabupaten Bojonegoro yang memiliki hak dan wawenang dalam mengatur dan mengurus otonomi daerahnya sendiri, mampu menggali dan memanfaatkan potensi sumber alam migas yang dimiliki daerah untuk meningkatkan PAD serta kesejahteraan masyarakat (sholikin, 2018). Pemerintah Kabupaten

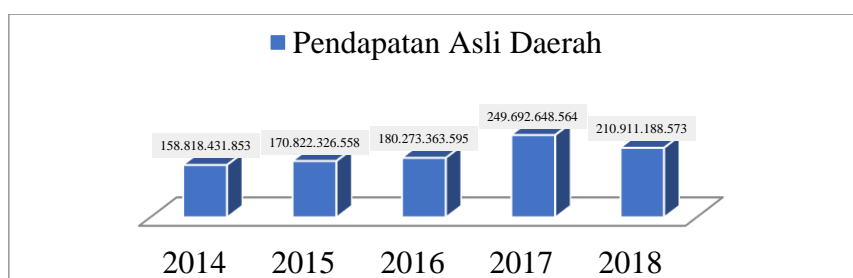
Kulon Progo juga memiliki hak dan wewenang sendiri dalam mengatur dan mengurus daerah otonom yang telah diberikan. Hal tersebut bermula sejak ditetapkan Kulon Progo menjadi salah satu Kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang selanjutnya berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dalam upaya meningkatkan PAD, melalui sumber-sumber pendapatan daerah yang dimiliki salah satunya sektor pajak, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber PAD yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan baik fisik maupun non-fisik pada suatu daerah. Kulon Progo juga memiliki potensi pariwisata yang cukup banyak dan bervariasi, dimana dari sektor pariwisata juga dapat meningkatkan perekonomian daerah, membangun ekonomi, meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar obyek wisata dan meningkatkan PAD.

Berikut ini data adalah data PAD Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu lima tahun terakhir, periode 2014-2018:

**Diagram 1.**

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014-2018



Sumber: BKAD Kab.Kulon Progo, 2019

Berdasarkan data dari diagram batang diatas, terlihat bagaimana perkembangan PAD kulon progo periode tahun 2014-2018, dimana berdasarkan data diatas pada tahun 2014 PAD kulon progo sebesar Rp.158.818.431.853,19 mengalami peningkatan PAD pada tahun 2015 sebesar Rp. 170.822.326.558,34 atau dalam persentase sebesar 7,6%. Kemudian pada tahun 2016 PAD Kabupaten Kulon Progo kembali mengalami peningkatan lagi yaitu sebesar Rp. 180.273.363.594,69 atau sebesar 5,4% dari tahun sebelumnya, dan pada tahun berikutnya pada tahun 2017, PAD Kabupaten Kulon Progo mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp. 249.692.648.563,65 atau naik sebesar 38,6%, hal ini dampak dari beberapa komponen, diantaranya adanya ganti rugi aset pemda dari pembangunan bandara *Yogyakarta International Airport* (YIA), dan adanya pengembalian dana sisa pilkada dari KPU. Kemudian pada tahun 2018 PAD mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp. 210.911.188.573,07 atau sebesar -15,6% dari tahun

2017, hal ini terjadi karena tidak ada lagi komponen penunjang seperti tahun 2017 yang diantaranya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang tidak lagi masuk kedalam komponen PAD sesuai regulasi baru yang berlaku, sudah tidak ada ganti rugi aset pemda dampak dari pembangunan bandara YIA dan tidak ada lagi pengembalian sisa dana pilkada dari KPU.

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, termasuk di dalamnya upaya meningkatkan PAD. Menurut (Sjafrizal, 2014) bahwa RKPD adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPMJD) dan mengacu pada RKP (Nasional) yang memuat tentang prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilakukan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo merancang berbagai strategi komunikasi untuk menyampaikan peraturan, kebijakan serta program pemerintah dalam upaya meningkatkan PAD, hal tersebut bertujuan untuk mensinergikan aspek-aspek komunikasi seperti media, pesan, dan metode komunikasi yang sesuai dengan karakter masyarakat sebagai khalayak, sasarannya agar proses komunikasi berjalan dengan efektif. Menurut (Perbawasari, 2016) Strategi komunikasi adalah sebuah panduan dari perencanaan komunikasi (*communication planning*) dan manajemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan.

Oleh karena itu, pemilihan strategi komunikasi yang tepat menjadi penentu keberhasilan dari peraturan, kebijakan serta program yang akan di keluarkan. Dalam penelitian (Perbawasari, 2016) salah satu strategi komunikasi yang dilakukan pemerintah agar program kerja pemerintah dapat melekat di masyarakat maka melalui metode sosialisasi yang efektif. Senada dengan penelitian (Mani, 2016; Chayatain, 2016) bahwa sosialisasi yang di lakukan melalui media massa, internet maupun menggunakan saluran komunikasi lokal berdasarkan kebiasaan dan budaya lokal masyarakat setempat sangat efektif.

Strategi dalam komunikasi dapat disebut sebagai "*guiding principle*" atau prinsip-prinsip yang akan dijadikan sebagai pedoman oleh aktor pelaksana dan orang-orang yang berkepentingan lainnya dalam mencapai tujuan, yakni untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat sebagai penerima manfaat. Adanya komunikasi yang baik, akan terciptanya kesamaan persepsi dan langkah dalam upaya-upaya yang dilakukan.

Hal tersebut dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo, terlihat agar produk peraturan, kebijakan serta program yang telah di keluarkan berjalan dengan baik, sesuai dengan apa yang diharapkan. Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui

bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo terkait bagaimana upaya yang dilakukan dalam meningkatkan PAD, baik komunikasi secara internal pemerintahan serta komunikasi yang dilakukan secara eksternal dengan pihak ketiga (*privat sector*) maupun dengan masyarakat sebagai penerima manfaat.

Pola dalam sebuah komunikasi dapat dipahami sebagai pola yang terjadi antar perorangan atau kelompok dalam proses pengiriman dan penerima pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang disampaikan pun dapat dipahami menurut Djamarah, dalam (Afrianty, 2015). Kemudian peneliti mengambil fokus pada studi bagaimana pola komunikasi yang dilakukan Pemerintah Kulon Progo dalam upaya meningkatkan PAD. Adapun tujuan dari penelitian ini, mengetahui bagaimana pola komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan PAD.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, menurut (Creswell 2018), penelitian kualitatif adalah berusaha mencari makna suatu fenomena yang berasal dari pandangan-pandangan para partisipan. Dalam penelitian ini berusaha menggambarkan secara sistematis sehingga nantinya bertujuan untuk dapat mengungkapkan, mendeskripsikan, menggambarkan, melukiskan dan menginterpretasikan secara jelas dan utuh mengenai bagaimanakah pola komunikasi pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Kulon Progo dalam upaya meningkatkan PAD.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif, dimana berapa indikator pada penelitian ini dianalisis menggunakan *software* Nvivo 12 Plus. Nvivo 12 Plus merupakan *software* yang digunakan peneliti untuk mengatur, menganalisis serta mengolah data non-numerik, sehingga dapat mempermudah penelitian secara kualitatif dengan menggunakan teks dan atau secara multimedia.

Kemudian sumber data pada penelitian ini yaitu berdasarkan wawancara dengan informan sesuai dengan kebutuhan penelitian terkait bagaimana pola komunikasi pemerintahan kabupaten kulon progo dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Komunikasi Pemerintahan Kulon Progo dalam meningkatkan PAD**

Hasil penelitian yang telah dilakukan Bentuk komunikasi pada pemerintahan kabupaten kulon progo dalam meningkatkan PAD, adalah dengan melakukan analisis komunikasi internal dan komunikasi eksternal sebagai bentuk komunikasi pemerintahan yang dilakukan dalam upaya meningkatkan PAD, dimana menurut Soesanto dalam Abidin (2016) komunikasi yang ada didalam komunikasi pemerintahan berupa komunikasi internal dan eksternal. Komunikasi internal antara pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara

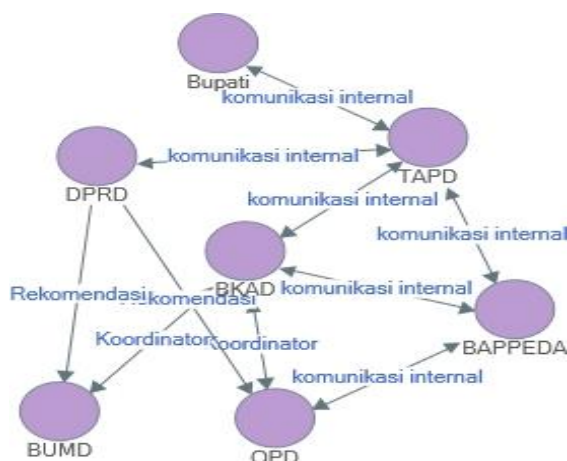
pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom, dan pihak-pihak terkait yang dilakukan komunikasi secara vertikal, horizontal dan diagonal dalam upaya meningkatkan PAD agar berjalan sesuai apa yang diharapkan. Kemudian komunikasi eksternal yang terjadi anatar pemerintah dan masyarakat serta adanya kerjasama yang terjalin antar instansi pemerintah dengan pihak swasta, sehingga terbentuk persamaan persepsi antara pemerintah dengan khalayak dilingkungan pemerintah daerah tersebut dan diharapkan mampu menyukkseskan realisasi dalam upaya peningkatan PAD kulon progo.

**Komunikasi Internal Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo**

Menurut Harivarman (2017) dalam penelitiannya bahwa Komunikasi internal dalam dimensi komunikasi organisasi adalah proses komunikasi yang terjadi antara anggota dalam organisasi, untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan organisasi. Komunikasi internal yang dilakukan dalam lingkup Pemkab kulon progo terkait bagaimana dalam meningkatkan PAD Dimana dalam meningkatkan PAD merupakan tugas lintas sektor di Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo, dengan melakukan komunikasi secara internal antara pemerintah daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, dan pihak-pihak terkait dengan upaya meningkatkan PAD agar berjalan sesuai yang diharapkan.

Komunikasi internal dalam peningkatan PAD pada Pemkab Kulon Progo adalah dengan melakukan komunikasi dengan lembaga-lembaga pemerintah terkait, seperti pada bagan berikut:

**Bagan 1.**  
**Komunikasi Internal Pemerintahan Kab. Kulon Progo**



Sumber: Diolah penulis, 2019 (Nvivo 12 Plus)

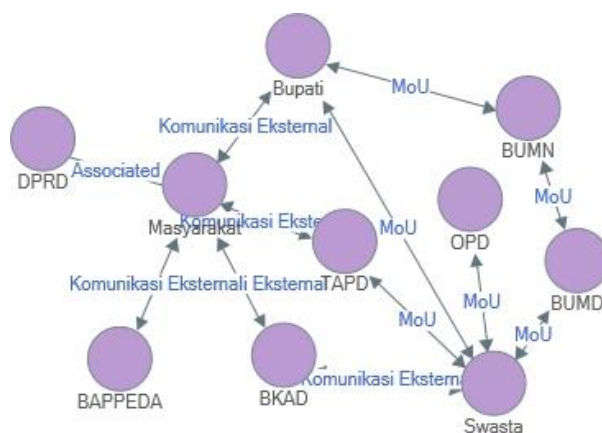
Berdasarkan *Network Sociogram* diatas bahwa komunikasi internal Pemerintah Kulon Progo dalam meningktan PAD berlangsung antara Bupati dengan beberapa lembaga yang

menjadi *leading sector* dalam internal pemerintah. Bupati memebri tugas kepada TAPD yang kemudian berkomunikasi dengan lembaga pemerintah daerah seperti BKAD yang mempunyai fungsi penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantu dibidang keuangan dan aset daerah, dan juga dengan BAPPEDA sebagai lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian dibidang pemerintahan dalam perencanaan pembangunan daerah. Serta bekomunikasi dengan DPRD sebagai lembaga (*legislatif*) yang mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, untuk di bahas dan disepakati bersama terkait bagaimana kebijakan umum anggaran daerah dan apa saja prioritas platfom anggaran daerah termasuk didalam upaya meningkatkan PAD Kulon Progo. Hal ini kemudian penulis artikan sebagai pola komunikasi yang ada pada pemerintahan kulon progo, dengan adanya komunikasi yang bersifat vertikal, horizontal mapun diagonal.

**Komunikasi Eksternal Pemerintah Kabupaten Kulon Progo**

Menurut Reardon dalam Purnomo (2018) Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang dilakukan melalui penyampaian sebuah informasi, diskusi dan kerjasama yang didalamnya terdapat pembicaraan dengan menggunakan pesan yang mudah untuk dimengerti. Komunikasi eksternal yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten kulon progo dengan masyarakat dan juga pihak swasta (*privat sector*). Adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan ataupun program pemerintah terkait peningkatan PAD dan melakukan kerja sama dengan pihak swasta dengan membuat nota kesepahaman atau biasa disebut *Momerendum of Understanding* (MoU), hal tersebut dilakukan sebagai sarana dan prasarana pendukung dalam upaya peningkatan PAD.

**Bagan 2.**  
**Komunikasi Eksternal Pemerintahan Kab. Kulon Progo**

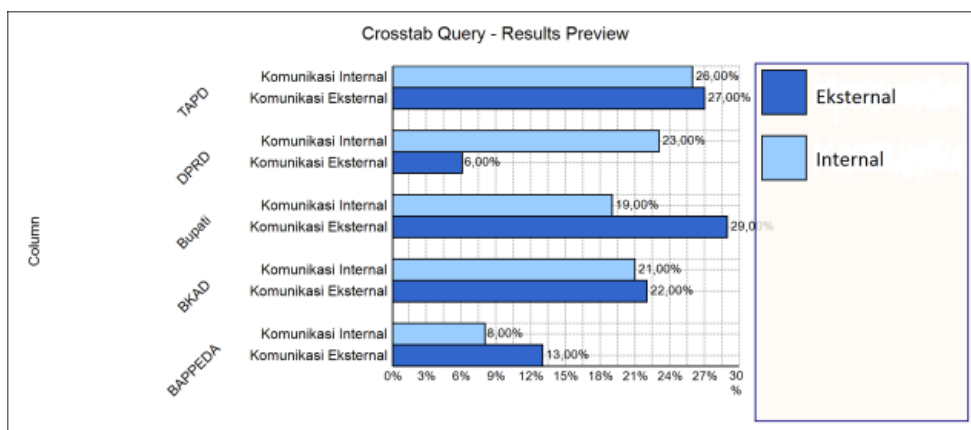


Sumber: Diolah penulis, 2019 (Nvivo 12 Plus)

Berdasarkan *Network Sociogram* diatas bahwa komunikasi eksternal Pemerintah Kulo Progo dalam meningkatkan PAD terlihat bagaimana adanya pola komunikasi yang terjalin antar Pemkab Kulon Progo dengan khalayak luar disekitar lingkup daerah Kabupaten Kulon Progo dalam meningkatkan PAD. Menurut Djamarah, dalam (Afrianty, 2015) dimana Pola komunikasi dapat dipahami sebagai pola yang terjadi antar perorangan atau kelompok dalam proses pengiriman dan penerima pesan dengan cara yang tepat, sehingga pesan yang disampaikan pun dapat dipahami.

**Gambar 1.**

**Komunikasi Internal dan Eksternal Pemerintah Kulon Progo**



Sumber: Diolah penulis, 2019 (Nvivo 12 Plus )

Berdasarkan keterangan gambar 1 diatas menggambarkan intensitas komunikasi setiap lembaga pada pemerintahan kabupaten kulon progo, baik dalam melakukan komunikasi internal maupun komunikasi yang dilakukan secara eksternal. data diatas menggambarkan intensitas komunikasi yang terjadi pada pemerintahan kabupaten kulon progo, baik dalam melakukan komunikasi internal maupun komunikasi yang dilakukan secara eksternal. Pada komunikasi internal lembaga yang paling dominan berdasarkan data di atas adalah TAPD 26,00% karena memang sebagai lembaga yang dibentuk langsung oleh bupati untuk menyusun penganggaran daerah dan melakukan komunikasi dengan pihak *legislatif*. Disusul DPRD 23,00% yang memang aktif melakukan pengawasan kepada pemerintah, serta memberikan rekomendasi. Kemudian BKAD 21,00% yang memang berperan sebagai koordinator dari 16 OPD bidang pendapatan dan berkoordinasi dengan TAPD terkait dengan perencanaan APBD. Selanjutnya Bupati 19,00% yang memberikan penugasan kepada lembaga-lembaga yang menjadi *leading sektor*, serta BAPPEDA 8,00% yang melibatkan BKAD dalam proses penyusunan RKPD KUA-PPAS terkait bagaimana kemampuan keuangan daerah, sebelum dikoordinasikan dengan TAPD.

Pada tahap komunikasi eksternal, Bupati 29,00% yang memang aktif melakukan komunikasi dengan melakukan pendekatan secara aktif dengan masyarakat, hal ini

dibuktikan dengan program safari subuh, kamisan dan lainnya serta dengan pihak swasta untuk melakukan MoU. TAPD 27,00% sebagai pembantu kepala daerah, BKAD 22,00% yang juga merupakan koordinator bidang perpajakan, serta BAPPEDA 13,00% yang menerima langsung masukan dari masyarakat pada musyawarah untuk dimasukkan dalam perencanaan pembangunan daerah. DPRD 6,00% yang memang tidak banyak melakukan komunikasi secara eksternal, karena hanya dapat memeberikan rekomendasi kepada pemerintah dan tidak ada kewenangan mengeksekusi secara langsung.

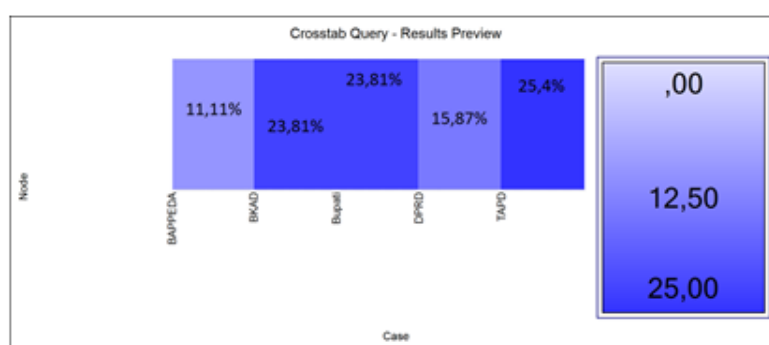
### Proses Komunikasi Pemerintahan Kolon Progo

Penelitian yang berfokus pada proses komunikasi pemerintah menggunakan teori komunikasi dari Model Laswell yang menjelaskan beberapa elemen dan alur komunikasi yang disajikan dalam model, yaitu pengirim (speaker), mengatakan apa (message), saluran atau media, penerima (audiens), dan efek (feedback) (Encang Saepudin et al., 2016; MEILISA, 2018); (Perbawasari et al., 2016). Proses komunikasi pemerintahan Kab. Kulon Progo dalam upaya meningkatkan PAD dilakukan oleh Bupati sebagai kepala pemerintahan yang berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait, terutama dengan lembaga yang memang menjadi *leading sektor* (sektor pemimpin) yaitu sebagai sektor penggerak dalam upaya meningkatkan PAD.

Menurut Stilman, pemerintah sebagai pelaku utama yang memulai kebutuhan komunikasi untuk melakukan berbagai hal, seperti memilih bahasa yang digunakan dalam prosesnya berdasarkan siapa yang menjadi komunikannya dan memilih saluran atau media yang tepat (Dewi & Nulul, 2018). Penyampaian pesan kepada komunikan terkait dengan upaya pemerintah kabupaten kulon progo untuk meningkatkan PAD dengan menggunakan media-media yang bekerja sama dengan pemerintah daerah ataupun komunikasi secara langsung, dimana setelah penyampaian pesan atau informasi yang diterima oleh komunikan, maka komunikan akan memberikan *feedback* atau umpan balik berupa peningkatan PAD.

Gambar 2.

Lembaga Pemerintah yang dominan dalam proses komunikasi



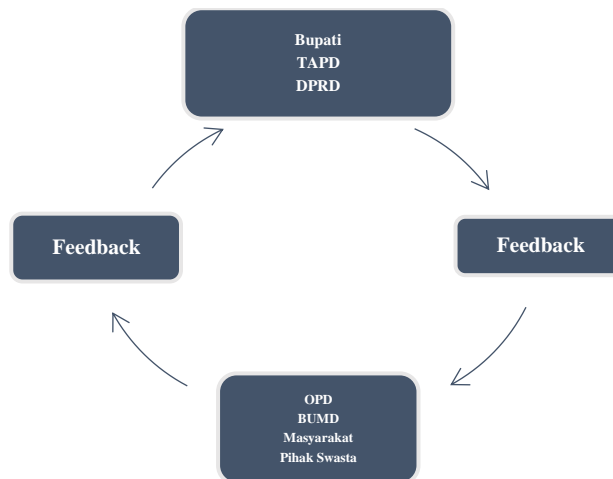
Sumber: Diolah penulis, 2019 (Nvivo 12 Plus)

Berdasarkan gambar di atas, bahwa lembaga pemerintah yang dominan dalam proses komunikasi yang dilakukan adalah yang pertama TAPD 25,4% kaerena memang sebagai kepanjangan tangan kepala daerah untuk mengakomodir BKAD dan BAPPEDA dalam proses penyusunan RKPD KUA-PPAS dan APBD serta melakukan komunikasi dengan pihak legislatif. Bupati 23,81% sebagai komunikator utama, sebagai kepala pemerintahan kemudian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang menjadi *leading sektor*. BKAD 23,81% sebagai koordinator dari 16 OPD bidang pendapatan. DPRD 15,87% pemberi rekomendasi kepada pemerintah, serta BAPPEDA 11,11% yang menyusun rancangan kegiatan dan prioritas pembangunan daerah.

Peran Pemerintah daerah dalam pelaksanaan upaya meningkatkan PAD sangat dominan karena semua konsep seperti pesan dan media yang dipilih untuk menyampaikan pesan yang akan digunakan dalam pelaksanaan upaya peningkatan PAD berasal dari pemerintah daerah Kulon Progo. Sehingga komunikasi kemudian merespon atau memberikan *feedback* sehingga komunikasi pemerintah yang tercipta dalam pelaksanaan upaya meningkatkan PAD Kulon Progo dikatakan sebagai komunikasi dua arah, hal ini dapat dilihat pada bagan dibawah sebagai berikut:

**Gambar 3.**

**Komunikasi dua arah antara Komunikator dan Komunikan di Kabupaten Kulon Progo**



Sumber: Diolah penulis, 2019

Dalam proses komunikasi terdapat beberapa elemen-elemen yang harus sesuai dengan proses komunikasi pemerintahan menurut Lasswel, diantaranya sebagai berikut:

**Komunikator**

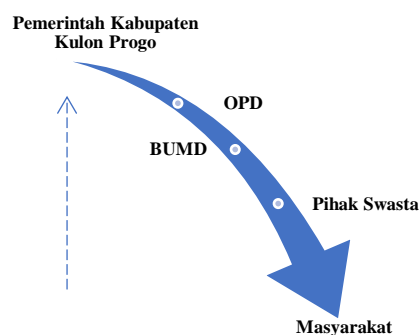
Komunikator atau pengirim pesan merupakan individu secara pribadi maupun secara lembaga/badan yang menyampaikan pesan kepada sejumlah orang ataupun hanya kepada satu orang. Pada pemerintahan kabupaten kulon progo dalam upaya meningkatkan PAD yang memang merupakan tugas lintas sektor semua lembaga dipemerintahan Kulon

Progo, menjadi tugas Bupati sebagai kepala pemerintah agar dapat menggali dan memaksimalkan setiap potensi yang ada di kulon progo, kemudian berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang menjadi *leading sector* atau lembaga penggerak bagi lembaga-lembaga lain terkait dalam upaya peningkatan PAD.

Adanya komunikasi dua arah pada pemerintahan kulon progo dalam upaya meningkatkan PAD. Dimana bupati dan lembaga yang menjadi *leading sector* berperan sebagai komunikator ketika menyampaikan pesan baik pada tingkat komunikasi secara internal maupun komunikasi secara eksternal. Organisasi perangkat daerah (OPD) dan badan usaha milik daerah (BUMD) pada komunikasi internal pemerintah, serta masyarakat dan pihak swasta pada komunikasi eksternal dapat berperan sebagai komunikator dan bupati dan lembaga *leading sector* pada komunikasi internal dan pemerintah secara umum pada komunikasi eksternal berperan sebagai komunikan atau penerima pesan dari komunikator saat menyampaikan kendala ataupun keluhan yang terjadi dilapangan dalam upaya meningkatkan PAD. Sehingga terjalin komunikasi dari atas ke bawah (*down ward communication*) dan komunikasi dari bawah ke atas (*upward communication*) jadi dapat dikatakan sebagai komunikasi timbal balik (*two way traffic communication*).

Komunikator yang paling dominan dalam upaya peningkatan PAD di Kabupaten Kulon Progo adalah pemerintah daerah, karena yang bertugas untuk mengatur dan mengawasi jalannya upaya meningkatkan PAD, sehingga peran pemerintah Kabupaten Kulon Progo lebih dominan dalam upaya meningkatkan PAD. Dalam upaya meningkatkan PAD ini bersifat dari atas ke bawah yang mana OPD, BUMD dan Masyarakat hanya melaksanakan perintah dari pemerintah daerah.

**Gambar 4.**  
**Komunikasi bersifat dari atas ke bawah**



Sumber: Diolah penulis, 2019

**Pesan**

Pesan dalam upaya peningkatan PAD kabupaten kulon progo berupa kebijakan, UU, maupun program-program yang berorientasi dalam peningkatan PAD. Bentuk pesannya sebagai berikut:

**Tabel 1.**  
**Pesan**

No.	Bentuk Pesan	keterangan
1.	Program/Kebijakan	Meningkatkan PAD dan kesejahteraan masyarakat
2.	Perda/Undang-undang	Meningkatkan PAD

Sumber: Diolah penulis, 2019

Bentuk pesan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo baik dalam upaya peningkatan PAD, maupun yang sifatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo. Berdasarkan pengamatan yang penulis lihat dilapangan, bentuk pesannya berupa sebuah kebijakan, program dan undang-undang.

a. Kebijakan yang dibuat Pemerintah Kulon Progo dalam upaya meningkatkan PAD, maupun yang sifatnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kulon Progo adalah:

- 1) Program Bela Beli Kulon Progo Bela Beli Kulon Progo ini merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat Kulon Progo untuk meningkatkan perekonomian daerah dengan meningkatkan produk lokal masyarakat: Air Kulon Progo ( Air Ku ) : produksi air mineral melalui PDAM. GAPOKTAN ( Gabungan Kelompok Tani ) : pemerintah memfasilitasi petani untuk memproduksi beras yang banyak. Hal ini dibuat untuk melindungi dan mensejahterakan para petani di Kulon Progo, sehingga dengan itu penghasilannya menjadi meningkat. Batik Geblek Renteng : masyarakat pengrajin batik memproduksi batik dengan motif geblek renteng yang kemudian pemerintah mewajibkan PNS maupun siswa untuk menggunakan seragam dengan motif geblek renteng. Dengan hal ini permintaan pasar yang besar kemudian berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan perajin batik di Kulon Progo. Bela Beli Proyek Infrastruktur Dalam membangun proyek infrastruktur harus menggunakan bahan baku yang didapat dari produksi masyarakat Kulon Progo itu sendiri.
- 2) TOMIRA ( Toko Milik Rakyat ) Kebijakan ini dibuat untuk melindungi usaha rakyat dari toko modern yang kian lama menjamur di Indonesia yang berdampak pada matinya usaha-usaha kecil masyarakat. Sehingga dengan hal itu pemerintah membuat kebijakan

untuk melindungi usaha kecil masyarakat dari toko modern, melindungi produk lokal, dan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat.

- 3) Program pengembangan pariwisata Kabupaten Kulon Progo ditempuh melalui program pengembangan destinasi pariwisata, program pengembangan pemasaran pariwisata, serta program pengembangan kemitraan. Program pengembangan destinasi pariwisata merupakan upaya menata kawasan/obyek wisata, serta melengkapi sarana dan prasarana pariwisata dengan tujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan (*tourist arrival*). Program Pengembangan pemasaran pariwisata dimaksudkan untuk lebih mengenalkan, memberikan informasi dan promosi pariwisata di Kulon Progo kepada pasar wisata potensial baik regional maupun nasional bahkan internasional. Sedangkan program pengembangan kemitraan dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan peran serta pelaku pariwisata dan masyarakat dalam mengembangkan pariwisata.
- b. Perda yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam upaya peningkatan PAD beberapa diantaranya seperti tabel berikut:

**Tabel 2.**  
**Perda dalam upaya meningkatkan PAD**

No.	Perda
1.	Perda No.3 Tahun 2011 Tentang retribusi tempat khus parkir
2.	Perda No.6 Tahun 2011 Tentang pajak daerah
3.	Perda No.15 Tahun 2011 Tentang retribusi izin mendirikan bangunan.
4.	Perda No.10 Tahun 2011 Tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah
5.	Perda No.6 Tahun 2015 tentang petunjuk pelaksanaan perda No.9 Tahun 2011 Tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Sumber: Diolah penulis, 2019

Kemudian masih banyak lagi peraturan daerah Kulon Progo yang sifatnya mengatur tentang retribusi, pajak dan lain sebagainya yang arahnya dalam upaya meningkatkan PAD.

### **Media/Saluran**

Saluran atau media yang digunakan dalam upaya peningkatkn PAD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pihak terkait secara luas diantaranya yaitu adanya *face to face* (tatap muka), media elektronik dan non elektronik.

Berikut ini adalah media/saluran yang dipilih oleh Pemerintah Kulon Progo dalam menyampaikan pesan kepada publik, sebagai berikut:

### **Komunikasi *face to face***

Komunikasi secara langsung atau disebut dengan komunikasi *face to face* bertujuan untuk mendekatkan jajaran pemerintah daerah dengan masyarakat, melalui komunikasi langsung ini diharapkan tidak ada lagi pembatas antara pemerintah dengan masyarakat. Sehingga masyarakat mampu berdialog langsung dengan pemerintah. Adanya komunikasi langsung atau tatap muka dengan masyarakat, dirasa dapat lebih mendekatkan diri kepada masyarakat kulon progo sehingga program maupun kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya peningkatan PAD dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat.

### **Pameran**

Pameran menjadi salah satu media/saluran yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di mana pameran dianggap sebagai anjang promosi baik itu potensi daerah maupun produk local daerah yang yang cukup efektif dalam menyampaikan informasi, dengan adanya interaksi secara langsung dari berbagai kalangan memberikan umpan balik secara langsung antara pelaku UKM dengan pengunjung pameran, selain itu dapat memperkenalkan produk-produk lokal, dapat meningkatkan penjualan produk dan memperluas jaringan penjualan.

### **Tomira**

Media untuk memasarkan produk lokal yaitu dengan tersedianya Toko Milik Rakyat (TOMIRA) sehingga produk lokal dapat masuk ke toko modern karena TOMIRA merupakan toko modern yang bekerjasama dengan Pemerintah Kulon Progo. Awal didirikannya TOMIRA karena adanya keresahan yang ada di masyarakat karena banyaknya toko modern yang berada dilingkungan pasar.

### **Media Sosial**

Diera teknologi seperti saat ini, penggunaan media sosial sudah sangat umum di kalangan masyarakat baik dari kalangan muda maupun kalangan tua. Pemerintah Kulon Progo memanfaatkan beberapa media sosial seperti Instagram, Twitter dan Facebook sebagai media untuk menyampaikan ataupun mempromosikan pariwisata dan juga agenda daerah yang menarik untuk orang datang, kepada masyarakat kulon progo khususnya dan publik secara luas.

### **Baliho/Pamplet**

Penggunaan media luar ruangan yang dipilih oleh Pemerintah Kulon Progo dalam upaya meningkatkan PAD, dimana dalam hal ini untuk memberi himbauan kepada masyarakat Kulon Progo agar membayar pajak daerah dengan memberi jargon "pajak daerah untuk pembangunan daerah" yang disampaikan lewat baliho. Pemerintah Kulon

Progo juga menggunakan media luar ruangan (Baliho/Pamphlet) dalam mempromosikan potensi daerah Kulon Progo kepada masyarakat Kulon Progo dan juga kepada publik secara luas.

### **Radio**

Media elektronik yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk memperkenalkan programnya salah satunya yaitu bekerjasama dengan Radio Republik Indonesia (RRI). Dalam acara yang bertema “Bupati Menyapa” Bapak Hasto Wardoyo selaku Bupati Kulon Progo dalam kesempatan siaran radio tersebut selalu menyelipkan pesan-pesan terkait Bela Beli Kulon Progo yang bertujuan agar masyarakat daerah Kulon Progo senantiasa mendukung adanya produk lokal Kulon Progo.

### **Sosialisasi**

Sosialisasi menjadi salah satu media yang dilakukan Pemerintah Kulon Progo untuk menyapaikan maksud dan tujuannya kepada masyarakat. Pemkab Kulon Progo melalui KPP pratama wates menggelar Sosialisasi peraturan perundang – undangan tentang pajak kendaraan bermotor, Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat mengenai peran pajak kendaraan bermotor untuk pembangunan di Kabupaten Kulon Progo dan untuk memaksimalkan sejumlah pelayanan bagi wajib pajak.

### **Website dan Aplikasi**

Kabupaten Kulon Progo telah menerapkan beberapa sistem informasi keterbukaan publik yang telah mengantarkan mereka sebagai kabupaten paling transparan di Indonesia. Tidak hanya terpusat dan terbatas secara domain berupa *website* kabupaten saja, Kabupaten Kulon Progo juga memiliki *website* yang berfungsi sebagai media publikasi eksternal di *sub-domain* setiap SKPD dan menawarkan cara-cara yang sifatnya manual juga. Semua strategi dan kebijakan pengelolaan keuangan di-*upload* di media ini baik itu berupa ringkasan RPJMD tingkat kabupaten maupun ringkasan Renstra di tingkat SKPD.

Aplikasi “RencanaKu” yang semua saran, masukan dan usulan dari masyarakat di tampung lewat aplikasi ini. Aplikasi ini milik pemerintah daerah dan dikelola oleh Bappeda. Hanya setiap warga Kulon Progo saja yang dapat mengakses aplikasi ini. Pengoperasiannya pun mudah, hanya memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Kartu Keluarga. Strategi penjangkungannya juga sangat beragam, baik itu melalui musrenbang tingkat desa sampai ke musrenbang tingkat kabupaten atau propinsi.

Media-media yang digunakan pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mengkomunikasikan upaya peningkatan PAD Kulon Progo diharapkan mampu menjangkau semua elemen masyarakat sehingga setiap produk pesan berupa kebijakan, program maupun perda yang dibuat Pemerintah Kabupaten Kulon Progo dapat tersampaikan dan

dilaksanakan dengan lancar dan sesuai dengan harapan yaitu mendukung dan meningkatkan PAD Kabupaten Kulon Progo.

**Komunikan**

Komunikan dalam proses Komunikasi adalah penerima pesan, dalam upaya meningkatkan PAD Kabupaten Kulon Progo komunikannya adalah OPD, BUMD, Pihak Swasta dan Masyarakat.

**Tabel 4.  
Komunikan**

No.	Komunikan	Keterangan
1.	OPD	Target pemda
2.	BUMD	Target pemda
3.	Pihak Swasta	Pajak dan Retribusi
4.	Masyarakat	Pajak dan Retribusi

Sumber: Diolah penulis, 2019

OPD bagian dari internal pemerintahan, yang bertanggungjawab kepada kepala daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah, termasuk didalamnya terkait pendapatan daerah, membantu daerah untuk meningkatkan PAD. Sedangkan BUMD, yang merupakan badan usaha milik daerah dikelola oleh pemda untuk menghasilkan pendapatan yang diharapkan dapat membantu daerah dalam meningkatkan PAD. Dilingkungan Pemkab Kluon Progo terdapat beberapa BUMD diantaranya; PD. BPR.Bank Pasar, PT. Selo Adikarto, Perumda Aneka Usaha KP, PDAM Tirta Binangun.

Pihak swasta adalah kelompok swasta yang berkegiatan usaha di Kabupaten Kulon Progo, mempunyai kewajiban membayar pajak dan retribusi berdasarkan ketentuan yang sudah dibuat oleh pemda kulon progo. Sedangkan masyarakat adalah seluruh masyarakat yang ada dikulon progo, yang mempunyai hak dan juga kewajiban yang telah diatur oleh pemda kulon progo.

**Feedback**

Umpan balik atau *feedback* diartikan sebagai respon atau reaksi yang dirasakan baik oleh OPD, BUMD dan masyarakat sebagai sasaran dari kebijakan, program dan peraturan maupun pemerintah sebagai pemberi kebijakan. Himbauan maupun program-program

terkait upaya peningkatan PAD yang diberikan oleh pemerintah, dimana komunikasi memberikan *feedback* berupa peningkatan PAD.

Ketika pemerintah mengeluarkan UU terkait perpajakan, lalu *feedback* yang diberikan oleh masyarakat adalah dengan membayar pajak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dimana hasilnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat dengan adanya fasilitas-fasilitas umum seperti jalan, pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya. Kemudian bagi pemerintah dengan masyarakat membayar pajak, mampu menjalankan roda pemerintahan dan merealisasikan kebijakan dan program-programnya.

## Penutup

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi pemerintah kabupaten kulon progo dalam upaya meningkatkan PAD dan berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi yang terjalin sebagai pola komunikasi pemerintahan kabupaten kulon progo dalam meningkatkan PAD sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari adanya komunikasi internal yang dilakukan oleh Bupati sebagai kepala pemerintahan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang menjadi *leading sector* atau sebagai sector penggerak seperti TAPD yang dibuat oleh bupati untuk mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan KUA-PPAS dan APBD, BKAD dan BAPPEDA dalam upaya untuk meningkatkan PAD, dan juga berkomunikasi dengan pihak DPRD sebagai lembaga perwakilan masyarakat ditingkat pemerintahan kabupaten kulon progo. Kemudian pada tingkat komunikasi eksternal dilakukan komunikasi dengan masyarakat sebagai tujuan dari setiap kebijakan pemerintah, serta komunikasi dengan pihak swasta sebagai penunjang sarana dan prasarana dalam upaya meningkatkan PAD.

Penggunaan media/saluran yang baik, oleh pemerintahan kulon progo sebagai alat untuk berkomunikasi, dilakukan dengan cara langsung (*face to face*) sehingga terjalin komunikasi yang cukup efektif antara komunikator sebagai lembaga atau individu yang menyampaikan pesan kepada komunikan sebagai kelompok atau perseorangan penerima pesan. Serta media/saluran lain seperti penggunaan media elektronik dan non elektronik (internet website, sosial media, radio, surat kabar, baliho/pamlet) dan media/saluran lain seperti pameran.

## Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti memberikan saran terkait upaya pemerintah kabupaten kulon progo dalam meningkatkan PAD, yaitu; komunikasi yang sudah berjalan cukup baik serta penggunaan media/saluran yang baik harus di iringi dengan inovasi pelayanan baik. Misalnya dengan membuat sebuah inovasi

pelayanan terkait pembayaran pajak, dengan menyediakan mobil pajak keliling untuk menjangkau daerah-daerah pinggiran dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberi kemudahan masyarakat dalam melaksanakan kewajibannya. Serta membuat inovasi baru terkait proses pembayaran pajak, misalnya bekerjasama dengan *e-commerce* yang ada, dengan membuat form khusus pada aplikasi *e-commerce* untuk pembayaran pajak.

Perlunya promosi dengan berkolaborasi dengan public figure (*influencer*) untuk menjangkau kelompok sasaran anak muda dan cakupan promosi yang luas dalam melaksanakan promosi potensi daerah, seperti kebudayaan lokal, event tahunan daerah, serta potensi pariwisata daerah yang ada di kulon progo. Sehingga diharapkan dengan adanya inovasi-inovasi tersebut dapat membantu dalam upaya meningkatkan PAD kabupaten kulon progo.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Afrianty, R. (2015). POLA KOMUNIKASI KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN PELALAWAN. *Jom FISIP*, 2(1).
- Chayatain, U. (2016). MODEL KOMUNIKASI PEMERINTAH UNTUK KEBIJAKAN AKSELERASI PENINGKATAN STATUS PASAR TRADISIONAL - MODERN, 524–538.
- Dewi, M., & Nulul, N. A. (2018). Komunikasi Partisipatif Masyarakat Industri dalam Mendukung Branding Kota Madiun. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 15, 75–90.
- Encang Saepudin, A. B. A. S. R. (2016). Communication Strategy in The Development of Agro-tourism Village in West Bandung Regency, 6(2), 154–168.
- Hadi Sasana. (2011). Analisis determinan belanja daerah di kabupaten/kota provinsi jawa barat dalam era otonomi dan desentralisasi fiskal, 18(1), 46–58.
- Handayani, T., & Widodo, R. (2018). STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH ( PAD ) MELALUI PENGEMBANGAN POTENSI PARIWISATA KABUPATEN MANGGARAI BARAT tentang Pembagian Urusan Pemerintah, 3, 75–91.
- Haryanto, I. (2010). *Media di bawah dominasi modal: ancaman terhadap hak atas informasi” dalam azasi*. Edisi Maret – April 2010
- Harivarman, D. (2017). HAMBATAN KOMUNIKASI INTERNAL DI ORGANISASI PEMERINTAHAN. *Jurnal ASPIKOM*, 3, 508–519.
- Mani, L. A., Guntoro, B., & Prajarto, N. (2016). Cultural Dimensions Toward the Government Communications in the Policy of Street Vendors Relocation at Yogyakarta City.
- MEILISA, V. F. (2018). Strategi komunikasi dinas pariwisata, kepemudaan dan olahraga, dan kebudayaan kabupaten indragiri hilir dalam menarik minat pengunjung objek

- wisata pantai solop. *Jom FISIP*, 5(1), 1–16.
- Perbawasari, S., Novianti, E., Studi, P., Hubungan, I., Komunikasi, F. I., & Bandung, U. P. (2016a). KABUPATEN PANGANDARAN Cukang Taneuh atau yang lebih bencana gempa bumi dan tsunami . tanpa merusak lingkungan dan. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 5.
- Perbawasari, S., Novianti, E., Studi, P., Hubungan, I., Komunikasi, F. I., & Bandung, U. P. (2016b). STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN DALAM PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN MELALUI SEKTOR PARIWISATA DI KABUPATEN PANGANDARAN. *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 5.
- Purnomo, A. (2018). PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOMUNIKASI ORGANISASI PEMERINTAHAN DI INDONESIA Arie. *Jurnal Noken*, 3(2), 11–26.
- Sjafrizal; *Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Era Otonomi*: Jakarta:Rajawali Pers, 2014
- Sianturi, A., Sjamsuddin, S., & Domai, T. (2015). PERAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM MENUNJANG DESENTRALISASI FISKAL DAN PEMBANGUNAN DAERAH (Studi pada Dinas Pendapatan Kota Batu), 2(3), 557–563.